



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

2023

PERENCANAAN KINERJA UKPBJ

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

BIRO UMUM



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tb. Muhammad Ihsan
Jabatan : Kepala Bagian Layanan Pengadaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arianto Surojo
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

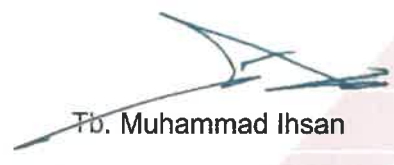
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Arianto Surojo
NIP. 19750331 200003 1 001


Tb. Muhammad Ihsan
NIP. 19810202 200603 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan Dokumen Perencanaan Kinerja Pengadaan Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan layanan dan pengukuran kinerja di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Diharapkan Dokumen Perencanaan Kinerja Pengadaan Tahun 2023 menjadi sarana dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan Kementerian Luar Negeri dari sisi pengadaan barang/jasa.

Kepala Bagian Layanan
Pengadaan



Tb. Muhammad Ihsan
19810202 200603 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
BAGIAN I	
PENDAHULUAN	5
BAGIAN II	
INDIKATOR KINERJA PENGADAAN	9
BAGIAN III	
INDIKATOR KINERJA PENGADAAN	11
BAGIAN IV	
BASELINE DAN TARGET KINERJA	14
BAGIAN V	
RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA	15
PENUTUP	16

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Layanan Pengadaan Tahun 2023 yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Penyusunan LKj Tahun 2023 telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Berdasarkan hal tersebut, LKj Bagian Layanan Pengadaan dalam memaparkan analisis capaian kinerja, beserta dengan kendala dan solusi yang dihadapi selama tahun 2023 telah mengacu pada 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process*, dan *Learning and Growth*.

Bagian Layanan Pengadaan memiliki tugas dan fungsi dalam memfasilitasi dan mendukung proses Pengadaan Barang/Jasa Kesekjenan dan seluruh Satker Kementerian Luar Negeri. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bagian Layanan Pengadaan/UKPBJ terus berupaya meningkatkan manajemen kinerja dengan berpedoman pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi internal sesuai dengan kaidah yang berlaku.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga.

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Hasil Pencapaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai jalur komunikasi atau pelaporan pencapaian kinerja yang dapat digunakan selama satu tahun baik dalam bentuk cetak, sistem informasi online, maupun dalam bentuk presentasi kepada pemangku kepentingan

D. TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa yang meliputi pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Layanan Pengadaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan;
- d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Merujuk poin b di atas, fungsi Bagian Layanan Pengadaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melakukan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Adapun Kepala Bagian Layanan Pengadaan menjabat sebagai Kepala Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Luar Negeri karena sifat tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Permenpan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga, besaran organisasi UKPBJ ditetapkan berdasarkan kriteria yang merupakan penilaian terhadap komponen yang berpengaruh pada beban kerja UKPBJ yang dihitung berdasarkan rata-rata dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hasil penghitungan ukuran organisasi UKPBJ yang telah dilakukan oleh Biro Umum Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2023, ukuran UKPBJ Kementerian Luar Negeri memiliki nilai 78,75 atau dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan administrator (Kepala Bagian).

E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Umum terdiri atas, yaitu:



F. OBJEKTIF DAN INDIKATOR STRATEGIS PENGADAAN

Objektif dan Indikator Strategis Pengadaan yang diselenggarakan oleh UKPBJ Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Objektif (Sasaran Kinerja)	Indikator Strategis	Area Pengukuran
Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan	Waktu
	Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	Biaya
	Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa	Kualitas
Terwujudnya Kinerja UKPBJ yang Baik	Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal	Tingkat Layanan

BAGIAN II INDIKATOR KINERJA PENGADAAN

2.1 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan

Sasaran Kinerja (SK)	Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang Jasa
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan
Keterangan	Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri mengajukan Nota Dinas usulan proses Tender/Seleksi/Tender Cepat untuk kemudian ditindaklanjuti dan penerbitan surat tugas kelompok kerja pemilihan oleh Kepala UKPBJ/Kepala Biro Umum. Tindak lanjut pelaksanaan pengadaan dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran

2.2 Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Objektif Kegiatan (OK)	Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa
Keterangan	Kelompok Kerja Pemilihan berupaya untuk mengedepankan prinsip efisien dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk memanfaatkan alokasi anggaran Pengadaan Barang/Jasa secara tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi dapat dilihat dari adanya selisih pagu anggaran pada RUP atau dari HPS dengan realisasi nilai kontrak yang disepakati.

2.3 Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Paket Pengadaan

Objektif Kegiatan (OK)	Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa
Keterangan	Memastikan terlaksananya proses pengadaan barang/jasa yang diusulkan ke UKPBJ mulai dari penelaahan dokumen, proses pemilihan, dan penetapan penyedia sampai dengan proses pemilihan selesai.

2.4 Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal

Objektif Kegiatan (OK)	Terwujudnya Kinerja UKPBJ yang Baik
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal
Keterangan	UKPBJ memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan ketentuan dan sesuai standar operasional prosedur (SOP). UKPBJ Kementerian Luar Negeri menyebarkan Kuesioner Kepuasan Layanan yang mana targetnya adalah <i>stakeholder/internal</i> dan penyedia/eksternal sebagai bahan evaluasi UKPBJ agar kedepannya dapat memberikan pelayanan maksimal.

BAGIAN III INDIKATOR KINERJA PENGADAAN

3.1 Sasaran Kinerja 1 - Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa

A. IKU 1 - Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan

Area Pengukuran	Waktu
Sumber Data	SiRUP dan LPSE
Frekuensi Penilaian	Tahunan
Formula	<p>Dari Segi Jumlah Paket</p> $= \frac{\text{Jumlah Paket pengadaan selesai tepat waktu}}{\text{Total jumlah paket pengadaan}} \times 100\%$ <p>Dari Segi Nilai Pagu Anggaran:</p> $= \frac{\text{Nilai Paket pengadaan selesai tepat waktu}}{\text{Total paket pengadaan}} \times 100\%$
Kriteria Pencapaian	$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ <p>Baik: >80 Cukup: 65-80 Kurang: <65</p>
Arah Pengukuran	Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja Pengadaan.

B. IKU 2 - Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Area Pengukuran	Biaya
Sumber Data	Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (HPS dan Nilai Kontrak)
Frekuensi Penilaian	Tahunan

Formula	<p>Efisien dari Pagu:</p> $= \frac{\text{Total Pagu} - \text{Total Kontrak}}{\text{Total Pagu}} \times 100\%$ <p>Efisiensi dari HPS:</p> $= \frac{\text{Total HPS} - \text{Total Kontrak}}{\text{Total HPS}} \times 100\%$
Kriteria Pencapaian	$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ <p>Baik: >80 Cukup: 65-80 Kurang: <65</p>
Arah Pengukuran	Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja Pengadaan.

C. IKU 3 - Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa

Area Pengukuran	Kualitas
Sumber Data	Pokja Pemilihan dan LPSE
Frekuensi Penilaian	Tahunan
Formula	<p>Dari Segi Jumlah Paket</p> $= \frac{\text{Total Jumlah Paket Pengadaan yang jadwalnya selaras dengan RUP}}{\text{Total jumlah Paket Pengadaan}} \times 100\%$
Kriteria Pencapaian	$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ <p>Baik: >80 Cukup: 65-80 Kurang: <65</p>
Arah Pengukuran	Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja Pengadaan.

3.1 Sasaran Kinerja 2 - Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa

D. IKU 1 - Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan

Area Pengukuran	Tingkat Layanan
Sumber Data	Hasil Kuesioner Kepuasan Layanan UKPBJ (Internal dan Eksternal)
Frekuensi Penilaian	Tahunan
Formula	$= \frac{\text{Jumlah pelanggan yang puas (internal)}}{\text{Kemlu}} \times 100\%$ $\text{Jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner}$ $= \frac{\text{Jumlah pelanggan yang puas (Eksternal)}}{\text{Kemlu}} \times 100\%$ $\text{Jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner}$
Kriteria Pencapaian	$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ Baik: >80 Cukup: 65-80 Kurang: <65
Arah Pengukuran	Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja Pengadaan.

BAGIAN IV BASELINE DAN TARGET KINERJA

Area Pengukuran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kategori	Baseline 2022	Target	
				2023	2024
Waktu	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan	Jumlah Paket	100%	100%	100%
Biaya	Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	8%	9%	9%
Kualitas	Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Selesai	100%	100%	100%
Tingkat Layanan	Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal	Internal dan Eksternal	-	93,87%	94%

BAGIAN V

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Utama	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan	Target
Ketepatan Waktu Perencanaan dan Pelaksanaan Paket Pengadaan	Optimalisasi dan percepatan penginputan RUP di aplikasi SiRUP	Januari s.d Maret	Seluruh KPA dan PPK
	Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Layanan Pengadaan Barang/Jasa, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini	Januari s.d Februari	Seluruh Staf di UKPBJ Kementerian Luar Negeri
Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	Memberikan fasilitas pendampingan bagi PPK dalam penyusunan HPS dan Perancangan Kontrak	Berkelanjutan	PPK
Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan barang/Jasa	Monitoring atas proses pemilihan secara berkala dan berkelanjutan		PPK dan Pokja Pemilihan
	Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan Kelompok Kerja Pemilihan dan PPK	Setiap Akhir Bulan	PPK dan Pokja Pemilihan
Tingkat Kepuasan Pelayanan UKPBJ	Menyebarkan Kuesioner kepuasan atas pelayanan UKPBJ kepada pihak internal (<i>stakeholder</i>) maupun eksternal (<i>penyedia</i>)	Januari s.d Maret	Pihak Internal dan Eksternal

PENUTUP

Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) terus diupayakan untuk diterapkan dalam setiap proses organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri, salah satunya adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja Pengadaan Tahun 2023 disusun sebagai alat-alat kendali dan alat ukur kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan adanya laporan perencanaan kinerja ini, diharapkan Indeks-Indeks Kinerja Utama yang direncanakan akan tercapai di tahun 2023 melebihi baseline tahun 2022.